



# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG  
2019 - 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien biladapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Renstra merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendaladan tantangan instansi pelaksana. Renstra ini diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 ini maka Dinas Kominfo mempunyai acuan umum tentang arah pelaksanaan kegiatan pemerintahan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program lebih kongkrit.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KOTA PADANG PANJANG**



**MARWIEN SH, M.Si**

**NIP.19610703 198203 1 008**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika .....	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.....	II-15
<b>BAB III PERMASALAHAN &amp; ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	III-1
3.2 Teaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	III-5
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika .....	III-7
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika .....	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika .....	IV-2
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah. Aktivitas pemerintah akan terlaksana dengan lebih baik jika seluruh tahapan proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen. Dibandingkan berbagai konsep perencanaan yang ada, perencanaan strategis masih memiliki kelebihan. Perencanaan strategic mendorong pemikiran kedepan menjelaskan arah yang dikehendaki dimasa yang akan datang. Barry (1986) menyakini bahwa kinerja organisasi yang menggunakan perencanaan strategik, baik organisasi besar maupun kecil, jauh melampaui organisasi lainnya yang tidak menggunakan perencanaan strategik. Hal ini antara lain karena perencanaan itu didasarkan atas dasar visi dan misi strategic yang jelas. Visi dan misi strategic itu sendiri mampu mengendalikan arah perencanaan yang baik.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menindak lanjuti hal tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Secara lebih spesifik, dengan konsep perencanaan strategik berarti kita membicarakan hubungan antara lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Konsep ini member petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal melalui serangkaian tindakan dilingkungan internal. Lebih dari itu, perencanaan strategik bahkan mampu memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan itu dan tidak hanya sekedar member reaksi atas perubahan di tingkat eksternal tersebut.

Ditingkat internal, perencanaan strategik mampu menciptakan Sinergi dan *l'esprit de corp*, yaitu semangat korp yang penuh integritas, yang dapat 'melicinkan' jalan menuju sasaran yang diinginkan. Semangat itu diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga daerah akan mampu memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan seoptimal mungkin. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Yeremias T. Keban, 2005, merumuskan pentingnya rencana strategis bagi suatu organisasi adalah:

- Alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat kearah tertentu;
- Sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan;
- Membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain.

Perencanaan strategis adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, perencanaan ini menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi dimasa datang dan bagaimana upaya mencapainya. Perencanaan strategis merupakan suatu kerangka berpikir logis dalam menentukan (i) *scanning*=dimana posisi kita sekarang (*where are we now?*); (ii) misi=akan kemana kita (*where are we going?*); (iii) strategi = bagaimana kita menuju kesana (*how do we get there?*); (iv) program= apakah desain teknis/cetak biru untuk pelaksanaan strategi (*what is our blueprint for action?*); dan (v) evaluasi=apakah kita sudah berada pada jalan yang benar (*what do we know if we are on the track?*).

Rencana strategis merupakan proses yang mengarahkan pimpinan organisasi dalam mengembangkan visi dan merefleksikan masa depan yang diinginkan. Rencana strategis mampu merubah cara berpikir manajemen, mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumber daya, sementara program sedang berlangsung. Fleksibilitas dan independensi akan menjadi kata kunci untuk pelaksanaan rencana strategis.

Di era digitalisasi saat ini, peran unit pengelola komunikasi dan informatika dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik dilingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Didalam lingkungan organisasi pemerintahan pemanfaatan serta pengelolaan TIK merupakan satu tugas yang unik karena perlu mengkombinasikan antara pemahaman tentang birokrasi, penguasaan teknologi dan kecerdasan dalam berinovasi. Oleh karenanya, dalam pengembangannya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen-elemen masyarakat. Inilah peran utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Padang Panjang.

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- 10) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- 11) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;



- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2025;
- 15) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023
- 17) Peraturan Walikota Padang Panjang 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

### **1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud keseluruhan dari rencana strategis adalah untuk membangun dan menjaga keseimbangan antara suatu organisasi dan lingkungan eksternalnya, sehingga sumber daya organisasi diletakkan pada kegunaan yang layak/terbaik dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman (Eadie,1989).

#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan induk yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun selama lima tahun;
- 2) Diketuainya secara obyektif, tajam dan realistis kondisi- kondisi eksternal dan internal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan;

- 3) Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kominfo Kota Padang Panjang selama lima tahun;
- 4) Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien;
- 5) Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan.

### **1.3.3 Manfaat**

Adapun manfaat atau kegunaan rencana strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Produktivitas : kemampuan pimpinan mengalokasikan sumberdaya sedemikian rupa dalam waktu tertentu dan menggunakan input tertentu sehingga dapat memproduksi lebih.
- 2) Keuntungan : kemampuan untuk memberi keuntungan lebih, atau melipatgandakan hasil atau menghemat sumber daya.
- 3) Efisiensi : penggunaan input tertentu dapat menghasilkan output yang maksimal.
- 4) Efektivitas : bahwa penggunaan input tersebut harus mencapai target-target atau tujuan yang ditetapkan.
- 5) Kualitas : mampu menghasilkan output yang tepat guna.
- 6) Keadilan : bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak mendiskreditkan pihak-pihak tertentu
- 7) Responsivitas : daya tanggap terhadap tuntutan yang ada.
- 8) Adaptasi : kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan tinggi.
- 9) Akuntabilitas : kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau keputusannya.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Tulisan ini menjelaskan latar belakang mengapa pentingnya suatu renstra pada umumnya, bagi Organisasi Perangkat Daerah pada khususnya; maksud dan tujuan; landasan hukum; sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KOMINFO KOTA PADANG PANJANG**

Memuat deskripsi tentang Dinas Kominfo Kota Padang Panjang selaku Organisasi Perangkat Daerah, dengan menjelaskan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang;



Sumberdaya manusia Aparatur yang dimiliki; Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo; serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kominfo; Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; Telaahan renstra kementerian dan renstra provinsi/kota; serta Penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMINFO**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, ditetapkanlah tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

Terkait dengan tugas di atas, Dinas Kominfo mempunyai fungsi sebagai berikut ;

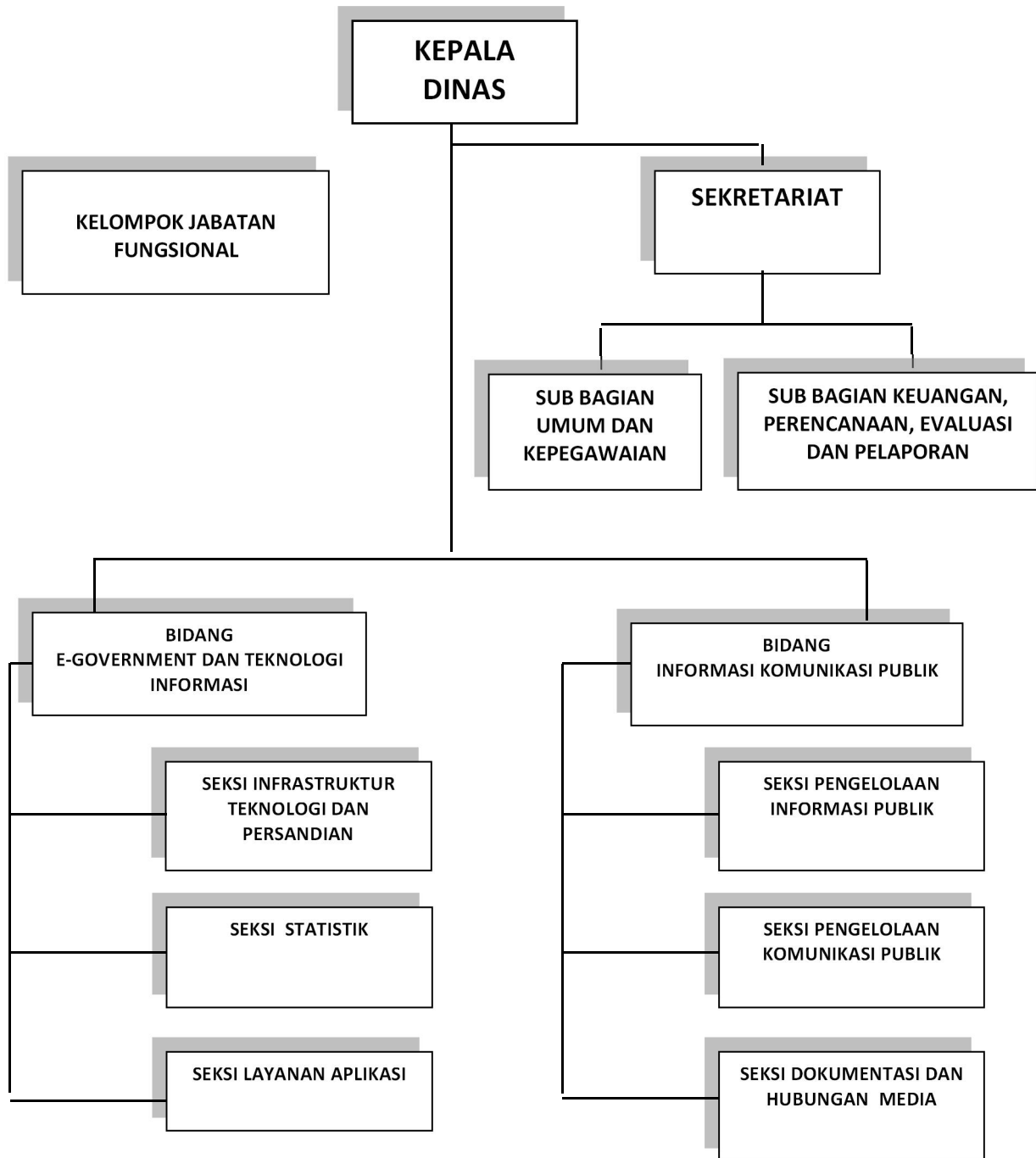
1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi;
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG**



Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kehumasan.
- 2) **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta

menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

3. **Bidang E-Government dan Teknologi Informasi**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur teknologi dan persandian;
  - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program statistik;
  - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan aplikasi; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari :

- 1) **Seksi Infrastruktur Teknologi dan Persandian**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Infrastruktur teknologi dan Persandian.
- 2) **Seksi Statistik**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Statistik.
- 3) **Seksi Layanan Aplikasi**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Aplikasi

4. **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan informasi publik;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan informasi komunikasi;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Dokumentasi dan Hubungan Media; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- 1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- 2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di daerah.
- 3) Seksi Dokumentasi dan Hubungan Media** yang dikepalai oleh Kepala Seksi Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi dokumentasi informasi publik dan hubungan dengan media.

## **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

## 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berjumlah 50 orang terdiri dari 18 orang PNS dan 32 orang tenaga harian lepas (THL), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.1 Aparatur

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Kebutuhan sesuai Anjab
		Laki-Laki	Perempuan		
<b>I.</b>	<b>PNS terdiri dari :</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>39</b>
	➤ <b>Pejabat Struktural</b>	7	3	10	
	➤ Fungsional Umum	3	<b>5</b>	<b>8</b>	
<b>II.</b>	<b>Pegawai Tidak Tetap</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	
	➤ Tenaga Harian Lepas				
	- Petugas Kebersihan	2	2	4	
	- Penjaga Kantor	2	-	2	
	- Sopir	2	-	2	
	- Pengolah Data	1	1	2	
	- Tenaga Peliputan Berita	1	3	4	
	- Tenaga Humas	1	-	1	
	- Tenaga Pengelolaan Videotron	-	1	1	
	- Tenaga Multimedia Kota	-	1	1	
	- Tenaga Pemasaran	-	2	2	
	- Programmer	2	1	3	
	- Tenaga Teknis Jaringan	-	3	3	
	- Teknisi Jaringan	2	-	2	
	- Operator Aplikasi	2	3	5	

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika masih terbatas. Sesuai anjab Tahun 2017 dibutuhkan 39 orang pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada OPD, sementara dengan keterbatasan jumlah PNS maka formasi yang kurang tersebut sebagian besar diisi oleh tenaga harian lepas.

Sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang dapat difungsikan sebagai unit pelayanan, kepada masyarakat, sebagai berikut:



Tabel II.2 Sarana Prasarana

<b>NO</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah/Ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>TANAH/BANGUNAN</b>		
1	Tanah bangunan kantor	1 bidang	406 m <sup>2</sup>
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 bidang	399 m <sup>2</sup>
3	Gedung Garasi/pool semi	2 bidang	60 m <sup>2</sup> dan 72 m <sup>2</sup>
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>		
4	Kendaraan Roda4	3 unit	
5	Kendaraan Roda2	5 unit	
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
6	Meja 1/2 Biro	18 unit	
7	Meja biro	8 unit	
8	Meja rapat (Kayu)	1 set	16 buah
9	Kursi rapat	20 unit	
10	Kursi tamu	2 set	6 buah
11	Kursi sandaran tinggi	12 unit	Kursi biro
12	Kursi sandaran sedang	2 unit	Kursi 1/2 biro
13	Kursi sandaran rendah	2 unit	
14	Filing kabinet	2 unit	
15	Lemari makan	2 unit	
16	Komputer / PC	11 unit	
17	Notebook/laptop	18 unit	
18	Hardisk	1 unit	
19	UPS	6 unit	
20	UPS Server	1 unit	
21	Videotron	10 unit	
22	Komputer server	5 unit	
23	Router	3 unit	
24	Swicth	2 unit	1 unit Rusak berat
25	Kabel fiber optik	1 paket	
26	Stabilizer	1 unit	
27	GPS	1 unit	
28	SWR meter	1 unit	
29	Cloud Core Router mikrotik	3 unit	
30	Antena radio wireless	19 unit	Rusak berat
31	Antena Sektoral	1 paket	
32	Mesin absensi	1 unit	Rusak berat
33	Rak Kayu	1 unit	Rusak berat
34	Printer/printer scanner	7 unit	
35	Router board mikrotik	55 unit	

36	CPU server PC	1 unit	<i>custom</i>
37	Box panel fan	1 unit	
38	Electrical box panel 32A	1 unit	
39	Electrical box panel 50A	1 unit	
40	AVR 10000VA	1 unit	
41	CCTV outdoor	4 unit	
42	CCTV kantor	7 unit	
43	Amplifier	1 unit	
44	Speaker ceiling	1 unit	
45	Penangkal petir	8 unit	
46	Gorden	1 paket	<i>41 m</i>
47	Mesin Fax	1 unit	
48	Proyektor	1 unit	
49	Lemari kaca	5 unit	
50	Televisi	3 unit	
51	Access point	30 unit	
52	Drone	1 unit	
53	Kamera	2 unit	
54	Box panel	43 unit	
55	Tabung Damkar 6 Kg	2 unit	
56	Besi Teralis	1 unit	
57	Papan nama instansi	1 unit	
58	Papan pengumuman	1 unit	
59	Mic wireless audio portable	1 unit	
60	Lemari arsip (Panjang)	1 unit	
61	Layar infokus	1 unit	
62	Slinger (Merah Putih)	1 paket	<i>60 m</i>
63	AC unit	3 unit	
64	NVR (Hikvision)	1 unit	
65	Server	1 unit	
66	Instalasi jaringan SIPKD	1 paket	

Dari tabel di atas dapat terlihat sejumlah sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh Dinas Kominfo sampai saat ini. Beberapa sarana yang tersedia masih terbatas dan belum memadai seperti kendaraan operasional, sarana untuk teknis operasional urusan layanan kominfo berupabberupa **Command Centre** dan **Media Centre** dan beberapa peralatan yang bersifat teknis lainnya.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna untuk menunjang kinerja pelayanan tergambar dalam tabel berikut :

Tabel T-C.2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra		Realisasi capaian tahun ke-		Rasio Capaian pada tahun ke-	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Persentase ketersediaan jaringan internet			62%	70%	99,65%	100%	298,25%	143%

Sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Kominfo 2017-2018, indikator kinerja pada Dinas Kominfo adalah pemenuhan ketersediaan jaringan internet di Kota Padang Panjang. Secara operasional, indikator ini menggambarkan ketersediaan jaringan internet di Kota Padang Panjang yang mencakup 24 OPD, 16 Kelurahan dan 43 sekolah.

Dari tabel capaian kinerja di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator persentase ketersediaan jaringan internet terealisasi sudah melebihi target. Dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 70 % untuk tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika mampu memperoleh realisasi sebesar 100 % atau dengan kata lain capaian realisasi mencapai 143%.

Pencapaian indikator ini diperoleh melalui pelaksanaan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, sehingga pada akhir tahun 2018 sudah tersedia dan terkelola jaringan internet di 51 titik fiber optik yang meliputi 24 OPD, 16 kelurahan, 4 puskesmas, sekolah dan 33 titik wifi.id.

Keberhasilan ini didukung oleh adanya komitmen Pemerintah Daerah terutama dalam hal kebijakan dan penganggaran untuk merealisasikan ketersediaan jaringan internet/bandwidth sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama untuk perkantoran, sekolah dan beberapa lokasi strategis wifi id gratis sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Selain pencapaian indikator kinerja di atas, kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika lainnya dapat terlihat sebagai berikut :

A. Penerapan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi, media internet atau media online, khususnya website di lingkungan Pemerintah Daerah dimulai sejak Tahun 2009 melalui website [www.padangpanjang.go.id](http://www.padangpanjang.go.id), yang diikuti oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Hingga Tahun 2018 sudah terdapat sebanyak 11 (sebelas) buah subdomain, diantaranya:

1. [www.bappeda.padangpanjang.go.id](http://www.bappeda.padangpanjang.go.id)
2. [www.bkd.padangpanjang.go.id](http://www.bkd.padangpanjang.go.id)
3. [www.dagkop.padangpanjang.go.id](http://www.dagkop.padangpanjang.go.id)
4. [www.dinsos.padangpanjang.go.id](http://www.dinsos.padangpanjang.go.id)
5. [www.dishub.padangpanjang.go.id](http://www.dishub.padangpanjang.go.id)
6. [www.dpk.padangpanjang.go.id](http://www.dpk.padangpanjang.go.id)
7. [www.dukcapil.padangpanjang.go.id](http://www.dukcapil.padangpanjang.go.id)
8. [www.pariwisata.padangpanjang.go.id](http://www.pariwisata.padangpanjang.go.id)
9. [www.pmptsp.padangpanjang.go.id](http://www.pmptsp.padangpanjang.go.id)
10. [www.rsud.padangpanjang.go.id](http://www.rsud.padangpanjang.go.id)
11. [www.uptdpkb.dishub.padangpanjang.go.id](http://www.uptdpkb.dishub.padangpanjang.go.id)

Untuk Sistem Informasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebanyak 11 (sebelas) buah sistem, diantaranya sebagai berikut:

1. Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui portal [www.lpse.padangpanjang.go.id](http://www.lpse.padangpanjang.go.id)

2. Layanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui [www.paduko.padangpanjang.go.id](http://www.paduko.padangpanjang.go.id)
3. Layanan perizinan melalui [www.sicantik.padangpanjang.go.id](http://www.sicantik.padangpanjang.go.id)
4. Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Masyarakat secara Online melalui [www.tambo.padangpanjang.go.id](http://www.tambo.padangpanjang.go.id)
5. Sistem Informasi BAZNAS melalui [www.baznas.padangpanjang.go.id](http://www.baznas.padangpanjang.go.id)
6. Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum melalui [www.jdih.padangpanjang.go.id](http://www.jdih.padangpanjang.go.id)
7. Sistem Informasi Layanan Kelurahan Online melalui [www.lakon.padangpanjang.go.id](http://www.lakon.padangpanjang.go.id)
8. Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru melalui [www.ppdbsmp.padangpanjang.go.id](http://www.ppdbsmp.padangpanjang.go.id)
9. Sistem Informasi Geografis Rencana Umum Penanaman Modal melalui [www.gis.pmptsp.padangpanjang.go.id](http://www.gis.pmptsp.padangpanjang.go.id)
10. Sistem Informasi Library Sistem melalui [www.inlislite3.dpk.padangpanjang.go.id](http://www.inlislite3.dpk.padangpanjang.go.id)
11. Sistem Informasi Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat melalui [www.skm.padangpanjang.go.id](http://www.skm.padangpanjang.go.id)

Adapun Sistem Informasi layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebanyak 12 (dua belas) buah sistem, diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melalui [www.simak.padangpanjang.go.id](http://www.simak.padangpanjang.go.id)
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) melalui [www.sipkd.padangpanjang.go.id](http://www.sipkd.padangpanjang.go.id)
3. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan melalui [www.eplanning.padangpanjang.go.id](http://www.eplanning.padangpanjang.go.id)
4. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi melalui [www.emonev.padangpanjang.go.id](http://www.emonev.padangpanjang.go.id)
5. Sistem Informasi Pembangunan Daerah melalui [www.sipd.padangpanjang.go.id](http://www.sipd.padangpanjang.go.id)
6. Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui [www.pituah.padangpanjang.go.id](http://www.pituah.padangpanjang.go.id)
7. Sistem Informasi Penilaian Analisa Jabatan melalui [www.palito.padangpanjang.go.id](http://www.palito.padangpanjang.go.id)

8. Sistem Informasi Tambahan Penghasilan ASN melalui [www.sitampan.padangpanjang.go.id](http://www.sitampan.padangpanjang.go.id)
9. Sistem Informasi Penilaian Prestasi ASN melalui [www.sipenari.padangpanjang.go.id](http://www.sipenari.padangpanjang.go.id)
10. Sistem Informasi Laporan Kerja Harian THL melalui [www.lkh.padangpanjang.go.id](http://www.lkh.padangpanjang.go.id)
11. Sistem Informasi Geografis Kota [www.gis.bappeda.padangpanjang.go.id](http://www.gis.bappeda.padangpanjang.go.id)
12. Sistem Informasi Perjalanan Dinas online melalui [www.sppd.padangpanjang.go.id](http://www.sppd.padangpanjang.go.id)

Sementara itu, penyebarluasan informasi kepada masyarakat dilaksanakan melalui media cetak surat kabar nasional maupun lokal serta penyiaran radio/ TV lokal.

#### B. Statistik

Urusan Statistik pada tahun 2018 masih dilaksanakan oleh Bappeda bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), melalui program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah yang menghasilkan publikasi buku sebagai berikut :

- Padang Panjang Dalam Angka;
- PDRB Kota Padang Panjang.

#### C. Persandian

Pada tahun 2018, urusan persandian sudah mulai dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Pelaksanaannya masih terbatas pada kegiatan pengelolaan dan peningkatan kapasitas pengamanan informasi dalam rangka penyelenggaraan e government dengan output berupa sosialisasi mengenai sistem pengamanan informasi/ persandian kepada 24 Kepala OPD.

Besarnya anggaran masing-masing penyelenggaraan urusan selama kurun waktu tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 – 2018

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.433.460.000,-	3.270.562.050	3.221.023.808	2.677.447.277	94%	83%
2.	Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah	Bappeda	Bappeda	-	-	-	-
3.	Program Persandian	-	-	-	-	-	-

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Perkembangan bidang komunikasi dan informatika yang pesat dan kompleks membutuhkan suatu regulasi yang dapat memfasilitasi dan mensinergikan berbagai kebutuhan pada layanan publik dan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.
- b. Tidak terstrukturinya update kapasitas SDM Aparatur dalam pengelolaan teknologi pada pelayanan public, sementara kemajuan teknologi informasi dalam pemerintahan yang pengejawantahannya dalam kerangka *e-government* berkembang begitu pesat. Hal tersebut



telah memaksa setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan dan pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal satu organisasi perangkat daerah tetapi juga antar unsur penyelenggara pemerintah daerah dan bahkan hingga pada layanan kepada masyarakat.

- c. Semakin tingginya tuntutan publik terhadap layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses, sementara tingkat pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat sangat beragam.
- d. Masih adanya ego-sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah terutama dalam hal sharing data dan informasi. Belum bakunya pola arus data informasi antar OPD.
- e. Semakin tingginya pelanggaran dan kriminalitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi (penyebaran berita/ informasi tidak valid/ hoaks, konten negatif dan berbagai jenis *cyber crime* lainnya).

Peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan diantaranya:

- a. Peraturan perundangan di bidang komunikasi dan informatika yang semakin komprehensif yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika baik dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan menteri.
- b. Adanya komitmen pemerintah kota terhadap pengembangan komunikasi dan informatika. Dibuktikan dengan dukungan yang kuat dari pimpinan terhadap penyusunan dan implementasi Masterplan Smart City melalui Gerakan Nasional Menuju 100 Smart City 2019.
- c. Infrastruktur TIK kota yang mulai berkembang menjadi memadai, hal ini diperkuat dengan kondisi geografis kota yang tidak terlalu besar sehingga memudahkan dalam peningkatan infrastruktur baru.
- d. Selanjutnya komitmen pimpinan daerah ini juga mendapat dukungan dari beragam stakeholder kota demi terwujudnya implementasi konsep Smart City di Kota Padang Panjang. Hal ini dibuktikan dengan tingginya dukungan baik dari DPRD dan masyarakat dalam implementasi rencana-rencana yang disusun dalam Masterplan Smart City.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

#### Pelayanan Dinas Kominfo

Berdasarkan tugas fungsi pelayanan yang diemban oleh Dinas Kominfo Kota Padang Panjang yang berkaitan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kemampuan dan kualitas layanan Infrastruktur jaringan yang masih minim yang ditandai dengan banyaknya keluhan terkait lemahnya koneksi jaringan atau unit-unit kerja yang belum terkoneksi jaringan.
2. Pengelolaan data dinamis secara elektronik diberbagai Organisasi Perangkat Daerah masih sangat minim. Saat ini, opd mengembangkan berbagai aplikasi atau sistem informasi secara sporadis. Namun tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat berdampak pada duplikasi investasi di bidang pembangunan sistem informasi dan ketidak efektifnya pencapaian e-government yang dituju.
3. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki skill dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dari personil yang ada saat ini juga diketahui tingkat literasi teknologi informasi komunikasi juga sangat beragam. Tidak hanya dikalangan staf, komitmen dan keterlibatan pejabat pada *top* dan *middle management* di setiap OPD dalam *workflow* aplikasi belum-lah optimal. Ironisnya ada sebagian pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi tidak dimanfaatkan atau diberdayakan keahlian sebagai tenaga pengelola sistem informasi tetapi sebagai tenaga administrasi bahkan sebagai penata usaha keuangan.
4. Sebagian Sistem informasi/ aplikasi, server, jaringan yang telah dibangun sebelumnya sebagaimana tersebut pada nomor 3 diatas belumlah disertai atau dilengkapi dengan security sistem yang handal. Penilaian tingkat kerentanan dari masing - masingnya mestilah

dilakukan sehingga dapat dipetakan sistem keamanan serupa apa yang harus di design. Bahwa secara empiris *cyber crime* sangat cepat berkembang dan memasuki hampir semua lini pemerintahan dengan tingkat dampak yang berbeda-beda.

5. Diseminasi informasi publik secara digital juga dirasa masih belum optimal. Tingkat persebaran informasi secara elektronik tidak sebanding dengan tingkat kecepatan informasi tercipta. Diseminasi informasi melalui pemberdayaan kelompok informasi masyarakat juga belum optimal. Hal ini ditandai dengan perkembangan aktif kelompok informasi masyarakat yang telah dibentuk berjalan lambat.
6. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penyelenggaraan urusan Kominfo dalam hal ini berupa **Command Centre** dan **Media Centre**.
7. Ketersediaan data statistik yang komprehensif dan terkini juga masih belum optimal. Kemampuan survey dan kompilasi data statistik yang masih belum memadai menyebabkan pemerintah kota memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan semua data statistik yang akurat.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no. 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kota Padang Panjang yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam Pemilukada Tahun 2018 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang terpilih dalam PILKADA yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang lalu adalah sebagai berikut :

**“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”**

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu :

1. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
2. Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
3. Kesehatan : Padang Panjang Sehat dan Bahagia
4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Kominfo berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-3 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif yang nantinya akan dijabarkan melalui penyelenggaraan pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai *smart city* di Indonesia adalah sebuah keniscayaan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan demi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Bahwa melalui e-government akan mampu memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas dikalangan penyelenggaraan pemerintahan; mampu mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan dan mampu menciptakan masyarakat berbasis komunikasi informasi yang lebih berkualitas.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota**

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2015-2019 mengacu kepada visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019, yaitu

**”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”**

Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung

jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kementerian Komunikasi dan Informasi menetapkan 5 sasaran strategis Tahun 2015-2019 diantaranya sebagai berikut :

SS.1 Meningkatnya kinerja infrastruktur jaringan

SS.2 Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi dan efektif

SS.3 Meningkatnya kapasitas sistem keamanan informasi.

SS.4 Meningkatnya kualitas pengelolaan, penyebaran informasi publik.

SS.5 Meningkatnya kualitas pelayanan data statistik

Sedangkan Visi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang

hendak dicapai dalam rangka mendukung pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan pengembangan sumberdaya manusia. Visi ini memberikan arah dan fokus yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tentang ke arah mana pembangunan tersebut akan dibawa dengan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal.

Adapun rumusan Visi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya pelayanan informasi dan komunikasi public berbasis teknologi informasi menuju Sumatera Barat yang madani dan sejahtera”***

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi yang memberikan gambaran bagaimana visi dapat dicapai.

Dengan melihat visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumbar, adanya focus pada pengembangan e-government dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk menyederhanakan birokrasi serta pelayanan publik, memberikan jaminan kecepatan respon terhadap keluhan dan kebutuhan publik terhadap layanan komunikasi dan informasi, pertukaran informasi secara online, mengeleminasi *redundant bureaucracy system*, serta meminimalisasi biaya pada pelayanan publik dan memaksimalkan hasil (*outcome*).

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi demi terwujudnya *smart city* melalui penyediaan jaringan dan kapasitas internet yang memadai, jaringan antar perangkat daerah, fasilitas pada area publik, data centre dan command centre menjadi pekerjaan rumah yang secara bertahap harus dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kota Padang Panjang dalam tahun-tahun kedepan.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan secara nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis terhadap isu strategis Dinas Kominfo Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

#### A. Lingkungan Internal

##### a. Kekuatan

1. Komitmen Pimpinan Daerah dalam penerapan e- government. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen tinggi Kepala Daerah dalam penyusunan dan implementasi Masterplan Smart City Kota Padang Panjang yang disusun melalui inisiasi Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Ketersediaan infrastruktur untuk pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini telah tersedia infrastruktur yang memadai dan kapasitas internet yang dinilai saat ini mampu mendukung berjalannya beragam system informasi utama pemerintah kota.
3. Kerjasama yang baik dengan stakeholder bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kominfo Kota Padang Panjang melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun dan mengembangkan e-government dengan membentuk komunitas IT, program magang bagimahasiswa/siswa jurusan IT dan praktek kerja lulusan perguruan tinggi tersebut. Kerjasama dengan pihak swasta yang kredibel dan memiliki pengalaman tinggi dibidang IT juga dirintis.

##### b. Kelemahan

1. Komitmen dan Keterlibatan pejabat dalam workflow aplikasi. Bahwa proses penerapan sebuah aplikasi pada setiap perangkat daerah terlihat hanya menjadi urusan middle management



hingga ke staff. Top management disetiap perangkat daerah tidak banyak yang mau terlibat aktif atau punya keinginan yang kuat untuk turut menguasainya.

2. Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS (Tingkat Literasi TIK). Minimnya kualifikasi PNS dibidang IT dan jumlah PNS yang menguasai IT yang tidak banyak juga mempengaruhi progress atau proses pengembangan e-government.
3. Masih belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan Koinfo dalam hal ini berupa Command Centre dan Media Centre
4. Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap perangkat daerah. Penguatan daya terima terhadap sebuah perubahan di masing-masing perangkat daerah seringkali tidak mengkrystal dikalangan pimpinan maupun staf. Bahwa setiap perubahan akan menimbulkan resistensi. Upaya meminimalisir resistensi yang ada dapat dilakukan dengan internalisasi perubahan itu sendiri.

## B. Lingkungan Eksternal

### a. Peluang

1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya mempenetrasi proses kerja yang ada dibirokrasi pemerintah daerah. Percepatan proses (efisien dan efektif) secara waktu, transparansi, akuntabel menjadi nilai yang dituju dengan kemajuan itu.
2. Peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika yang semakin komprehensif. Saat ini begitu tersedianya produk hokum bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistik mulai dari undang- undang hingga peraturan menteri atau kepala lembaga negara yang menangani urusan tersebut dalam memberikan petunjuk teknis kepada pemerintah daerah.
3. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 salah satunya Program Percepatan Reformasi Birokrasi adalah Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik. Dengan

menjadi bagian utama system pemerintahan eletronik dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa e-government telah menjadi sebuah keniscayaan dari perubahan besar yang ingin dicapai secara nasional.

b. Ancaman/Tantangan

1. Semakin tingginya tuntutan publik terhadap layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses. Masyarakat semakin menunjukkan partisipasinya dalam mengontrol pemerintah dengan semakin tingginya nilai-nilai kritis yang disampaikan sebagai pengguna layanan public.
2. Masih adanya ego-sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah terutama dalam hal sharing data dan informasi. Belum adanya kesamaan cara pandang bagi perangkat daerah terhadap pentingnya integrase data, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan data centre yang menjadi pekerjaan rumah Dinas Kominfo Kota Padang Panjang kedepannya.
3. Semakin tingginya kriminalitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi (*cyber crime*). Bahwa hari ini perangkat daerah beramai-ramai mendisain dan membangun aplikasi atau system informasi, namun tidak dibarengi dengan kesadaran atau pemahaman untuk melakukan upaya pengamanan informasi atau data yang terdapat pada aplikasi/ system informasi tersebut.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dirumuskanlah visi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

***Menjadi lokomotif di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan Padang Panjang Smart City***

Dari visi tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Dinas Kominfo Kota Padang Panjang memiliki peran utama sebagai penggerak dan pelopor penyelenggaraan dan pengembangan e-government atau system pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan menjadi hal yang semestinya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien.
- Dinas Kominfo Kota Padang Panjang sebagai penggerak dan bersama-sama perangkat daerah lainnya berkomitmen menjadikan Kota Padang Padang sebagai smart city diantara pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Untuk terwujudnya visi tersebut, ditetapkan misi sebagai bentuk upaya atau cara yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berbasiskan teknologi terkini.
2. Meningkatkan kualitas dan standarisasi system informasi yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang secara efisien dan efektif.
3. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi dan peningkatan keterbukaan informasi kepada publik.
4. Mewujudkan ketersediaan data statistik yang komprehensif dan terbaru.

## 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

**Tujuan** : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

**Sasaran 1** : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

**Sasaran 2** : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

**Sasaran 3** : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia

Tabel 4.1

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
					(I) 2019	(II) 2020	(III) 2021	(IV) 2022	(V) 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	<b>Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>				1,86	2,65	2,7	2,85	3	
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	<b>Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>				1,86	2,65	2,7	2,85	3
			<b>Program E Government dan Tekhnologi Informasi</b>	indeks implementasi tata kelola SPBE	1,5	1,75	2	2,5	3		
		indeks implementasi layanan SPBE		2,25	2,4	2,6	2,8	3			
	<b>Program Persandian dan Pengamanan Informasi</b>	% sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan digital	29%	57%	71%	86%	100%				

		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	71 <small>(Cukup informatif)</small>	74 <small>(Cukup informatif)</small>	78 <small>(Cukup informatif)</small>	81 <small>(menuju informatif)</small>	84 <small>(menuju informatif)</small>	
			<b>Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan informasi Publik	2,6 <small>(baik)</small>	2.65 <small>(baik)</small>	2.7 <small>(baik)</small>	2.85 <small>(baik)</small>	3 <small>(baik)</small>
		Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	25%	30%	32%	35%	40%	
			<b>Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral</b>	persentase elemen data statistik sektoral yang tersedia	81%	81,5%	82%	82,5%	83%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Demi tercapainya visi Dinas Kominfo maka perlu perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk merumuskan tentang arah kebijakan tahunan dan tahapan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan rencana kerja Dinas Kominfo. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan adalah tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

<b>Visi : “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”</b>			
Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif Partisipatif			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Terkelolanya Sistim Informasi yang terintegrasi	Pengelolaan akses internet
			Pengembangan aplikasi
		Terkelolanya infrastruktur TI	Pengembangan infrastruktur TIK
		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM TI	Pelatihan SDM TIK
		Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah	Penyelenggaraan Keamanan Informasi

	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif	Pemberdayaan Komunitas Masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi
			Penyebarluasan informasi melalui media Pemerintah Daerah
			Peningkatan kerjasama/hubungan dengan media
			Peningkatan layanan informasi publik (PPID)
			Penyelenggaraan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah
		Terlaksananya komunikasi publik yang responsif	Layanan LAPOR
	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral	Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Terpenuhinya ketersediaan data statistik sektoral



**Tabel 5.2**  
**Arah Kebijakan**

No	Arah Kebijakan	Tahun pelaksanaan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengelolaan akses internet					
2	Pengembangan aplikasi					
3	Pengembangan infrastruktur TIK					
4	Pelatihan SDM TIK					
5	Penyelenggaraan Keamanan Informasi					
6	Penyediaan Data StatistikSektoral					
7	Pemberdayaan Komunitas Masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi					
8	Penyebarluasan informasi melalui media Pemerintah Daerah					
9	Peningkatan kerjasama/hubungan dengan media					
10	Peningkatan layanan informasi publik					
11	Penyelenggaran dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah					
12	Layanan LAPOR					

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai upaya untuk mewujudkan visi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
7. Program eGovernment
8. Program Persandian dan Pengamanan Informasi
9. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektor

Penjabaran sasaran strategis menjadi sasaran antara dengan indikator kinerja masing-masingnya serta uraian ke program dan kegiatan terurai pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				URUSAN WAJIB																		
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkannya tata laksana organisasi perangkat daerah			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	na	90%	788.705.000	90%	743.877.000	90%	788.705.000	90%	788.705.000	90%	817.949.000	90%	3.871.941.000		Padang Panjang		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	2.925.000	2 jenis	2.925.000	2 jenis	2.925.000	2 jenis	2.925.000	2 jenis	2.925.000	2 jenis	14.625.000		Sekretariat		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 rekening	3 rekening	123.400.000	3 rekening	123.400.000	3 rekening	130.000.000	3 rekening	130.000.000	3 rekening	130.000.000	3 rekening	3 rekening	636.800.000		Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 kendaraan (2 roda 4 dan 5 roda 2)	8 (3 unit kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2)	126.280.000	9 (4 unit kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2)	126.280.000	9 (4 unit kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2)	130.000.000	9 (4 unit kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2)	130.000.000	9 (4 unit kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2)	130.000.000	9 (4 unit kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2)	130.000.000	9 (4 unit kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2)	642.560.000		Sekretariat
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara/dibersihkan	1 unit	1 unit	172.600.000	1 unit	172.600.000	1 unit	172.600.000	1 unit	172.600.000	1 unit	172.600.000	1 unit	175.000.000	1 unit	865.400.000		Sekretariat

				Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	jumlah jenis ATK	3 jenis	3 jenis	14.000.000	1 Paket	14.000.000	3 jenis	14.000.000	3 jenis	16.000.000	3 jenis	16.000.000	Sekretariat		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 jenis (cetak, jilid dan fotocopy)	3 jenis	17.500.000	3 jenis	17.500.000	3 jenis	17.500.000	3 jenis	17.500.000	3 jenis	87.500.000	Sekretariat		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	4 jenis (lampu, baterai, kabel dan peralatan listrik lainnya)	4 jenis	10.000.000	4 jenis	10.500.000	4 jenis	10.000.000	4 jenis	10.000.000	4 jenis	50.500.000	Sekretariat		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan dan minum rapat yang disediakan		2000 ok	35.000.000	2000 ok	35.000.000	2000 ok	35.000.000	2000 ok	35.000.000	10000 ok	175.000.000	Sekretariat		
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah	125 orang/kali	125 orang/kali	287.000.000	125 orang/kali	241.672.000	125 orang/kali	276.680.000	125 orang/kali	276.680.000	301.524.000	625 orang/kali	1.383.556.000	Sekretariat	
				Penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi	jumlah tagihan rekening yang dibayarkan   jumlah jenis pengadaan alat listrik			-	3 (Jenis)   4 (Jenis)	133.900.000	3 (Jenis)   4 (Jenis)	140.000.000	3 (Jenis)   4 (Jenis)	140.000.000	3 (Jenis)   4 (Jenis)	140.000.000	3 (Jenis)   4 (Jenis)	687.300.000	
				Penyediaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat   Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan   Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan   Jumlah jenis dokumen perencanaan dan laporan kinerja daerah   Jumlah jenis laporan keuangan			-	2 (Jenis)   3 (Jenis)   3 (Jenis)   22 (Jenis)   15 (Jenis)	50.025.000	2 (Jenis)   3 (Jenis)   3 (Jenis)   22 (Jenis)   15 (Jenis)	50.025.000	2 (Jenis)   3 (Jenis)   3 (Jenis)   22 (Jenis)   15 (Jenis)	55.125.000	2 (Jenis)   3 (Jenis)   3 (Jenis)   22 (Jenis)   15 (Jenis)	57.125.000	2 (Jenis)   3 (Jenis)   3 (Jenis)   22 (Jenis)   15 (Jenis)	192.525.000	Sekretariat

			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>		90%	162.900.000	90%	367.500.000	90%	85.000.000	90%	190.000.000	90%	755.000.000	90%	1.210.400.000		Padang Panjang
			Rehab sedang/berat gedung kantor	jumlah bangunan yang direhab	1 (Gedung)		-	1 gedung	200.000.000		-		-		-		200.000.000	Sekretariat	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit roda 4, dan 3 unit roda 2	665.000.000	1 unit roda 4, dan 3 unit roda 2	665.000.000	Sekretariat	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	7 jenis	7 jenis	87.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jenis	87.900.000	Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 gedung	50.000.000	Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	jumlah alat-alat yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jenis	25.000.000	Sekretariat	
			Pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung dan perlengkapan yang dipelihara	-	1 (Gedung), 7 (jenis)	-	1 (Gedung), 7 (jenis)	80.000.000	1 (Gedung), 7 (jenis)	65.000.000	1 (Gedung), 7 (jenis)	84.500.000	1 (Gedung), 7 (jenis)	90.000.000	1 (Gedung), 7 (jenis)	75.000.000	Sekretariat	
			Pengadaan perlengkapan gedung dan alat kantor	jumlah jenis perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-	14 jenis	87.500.000	10 jenis	20.000.000	10 jenis	105.500.000	-	-	34 jenis	107.500.000	Sekretariat	
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>persentase pemenuhan pakaian dinas</b>		100%	0	100%	50.000.000	0	0	100%	60.000.000	0	0	100%	110.000.000		Padang Panjang

			Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	-	-	-	60 stel	50.000.000	-	-	60 stel	60.000.000	-	-	120 stel	110.000.000	Sekretariat	
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>90%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>85.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>369.500.000</b>		Padang Panjang
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek	-	10 orang/kali	50.000.000	10 orang/kali	45.000.000	10 orang/kali	75.000.000	10 orang/kali	80.000.000	10 orang/kali	85.000.000	50 orang/kali	369.500.000	Sekretariat	
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>74.400.000</b>		Padang Panjang
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	-	23 dokumen	1.300.000	22 dokumen	10.000.000	22 dokumen	10.000.000	22 dokumen	12.000.000	22 dokumen	12.000.000	111 dokumen	71.300.000	Sekretariat	
			Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	-	15 laporan	500.000	15 laporan	5.600.000	15 laporan	5.600.000	15 laporan	8.700.000	15 laporan	8.700.000	75 laporan	3.100.000	Sekretariat	
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	<b>Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>2,6</b>	<b>2.388.755.325</b>	<b>2,65</b>	<b>2.348.031.018</b>	<b>2,7</b>	<b>2.409.823.444</b>	<b>2,85</b>	<b>2.392.369.070</b>	<b>3</b>	<b>2.433.114.645</b>	<b>3</b>	<b>5.900.836.913</b>		Padang Panjang
			Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang	jumlah KIM yang aktif	-	2 kelompok	49.450.000	2 kelompok	49.450.000	2 kelompok	49.450.000	2 kelompok	49.450.000	2 kelompok	49.450.000	10 kelompok	247.250.000	Bid IKP	
			Pembinaan dan Pengembangan Media Tradisional	jumlah Media Tradisional yang dibina	-	1 kelompok	125.150.000	1 kelompok	125.150.000	1 kelompok	125.150.000	1 kelompok	125.150.000	1 kelompok	125.150.000	5 kelompok terbina	625.750.000	Bid IKP	

			Penayangan Dialog Interaktif	jumlah penyelenggaraan dialog interaktif melalui media televisi	-	4 kali	149.830.000	4 kali	149.830.000	4 kali	149.830.000	4 kali	149.830.000	20 kali	749.150.000	Bid IKP		
			Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial	jumlah release berita mengenai informasi aktual di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	-	400 release	162.645.375	450 release	166.711.509	500 release	175.047.085	550 release	180.000.000	600 release	180.000.000	2500 release	864.403.969	Bid IKP
			Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron	Jumlah konten videotron	-	250	242.145.375	275	248.199.009	300	254.403.985	325	300.000.000	350	300.000.000	1500	1.344.748.369	Bid IKP
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	Jumlah OPD yang sudah mengelola Daftar Informasi Publik	-	10	109.919.075	14	75.000.000	18	85.000.000	22	85.000.000	24	85.000.000	24	439.919.075	Bid IKP
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media massa	jumlah kerjasama dengan media massa	-	50 media massa (Cetak, on line/portal, radio dan televisi)	1.243.615.500	-	-	-	-	-	-	-	-	50 media massa (Cetak, on line/portal, radio dan televisi)	1.243.615.500	Bid IKP
			Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	jumlah penerbitan majalah Serambi Mekkah	-	4 edisi	283.000.000	-	-	-	-	-	-	-	28 edisi	283.000.000	Bid IKP	
			Pembinaan dan Pelatihan Badan Koordinasi Kehumasan	jumlah peserta pelatihan	-	50 (24 OPD, 16 Kelurahan, 10 Instansi Vertikal)	23.000.000	-	-	50 (24 OPD, 16 Kelurahan, 10 Instansi Vertikal)	30.000.000	-	-	-	50.000.000	50 (24 OPD, 16 Kelurahan, 10 Instansi Vertikal)	103.000.000	Bid IKP

			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah jenis media publikasi informasi pembangunan daerah	-		-	5 jenis	1.533.690.500	5 jenis	1.540.942.374	5 jenis	1.502.939.070	5 jenis	1.493.684.645	5 jenis	6.071.256.589	Bid IKP		
Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Implementasi tata kelola SPBE	Indeks Implementasi layanan SPBE	Program Government e-indeks (Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik) SPBE		2.6	7.990.214.000		6.243.360.000	2.7	5.276.360.000	2.85	4.159.855.000	3	4.370.700.000	3	28.040.489.000		Padang Panjang		
			Pengelolaan Layanan Akses Internet Intranet Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah Node Akses Internet yang dikelola	69 Node	1.815.350.000	72 Node	2.200.000.000	72 Node	-	72 Node	-	72 Node	-	72 Node	16.015.350.000	Bid E Gov TI			
			Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	6 jenis infrastruktur TI (3 lokasi Videotron, 11 server, 69 acces point dan 69 buah router, 17 unit CCTV, 1 paket Command Center )	5.266.201.800	6 jenis infrastruktur TI (3 lokasi Videotron, 18 server, 92 acces point dan 92 buah router, 37 buah CCTV, 1 paket Command Center )	2.500.000.000	6 jenis infrastruktur TI (3 lokasi Videotron, 18 server, 124 acces point dan 124 buah router, 67 buah CCTV, 1 paket Command Center )	3.733.000.000	6 jenis infrastruktur TI (3 lokasi Videotron, 21 server, 147 acces point dan 147 buah router, 90 buah CCTV, 1 paket Command Center )	2.616.495.000	6 jenis infrastruktur TI (3 lokasi Videotron, 24 server, 157 acces point dan 157 buah router, 100 buah CCTV, 1 paket Command Center )	2.827.340.000	6 jenis infrastruktur TI (3 lokasi Videotron, 24 server, 157 acces point dan 157 buah router, 100 buah CCTV, 1 paket Command Center )	16.943.036.800	Bid E Gov TI			
			Pengelolaan Padang Panjang Smart City	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	6	765.302.200	12	900.000.000	16	900.000.000	18	900.000.000	20	900.000.000	20	4.365.302.200	Bid E Gov TI			
			Pelatihan SDM di bidang Teknologi Informasi	Jumlah peserta pelatihan	200 orang	143.360.000	200 orang	143.360.000	200 orang	143.360.000	200 orang	143.360.000	200 orang	143.360.000	1000 orang	716.800.000	Bid E Gov TI			
			Pengembangan Stasiun TV Pemda	Jumlah TV Pemda yang dioperasikan			1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	2.000.000.000		
			Program Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan digital	33%	23.520.000	50%	29.795.000	67%	31.160.000	83%	32.685.000	100%	34.370.000	100%	151.530.000		Padang Panjang		



			Penyelenggaraan Persediaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	jumlah pelatihan pengamanan informasi yang diadakan		1 kegiatan	23.520.000	1 kegiatan	29.795.000	1 kegiatan	31.160.000	1 kegiatan	32.685.000	1 kegiatan	34.370.000	1 kegiatan	151.530.000	Bid E Gov TI		
	Tersedia data yang memenuhi standar satu data indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	<b>Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase elemen data Statistik sektoral yang terpublikasi</b>		<b>81%</b>	<b>58.335.000</b>	<b>81,5%</b>	<b>58.335.000</b>	<b>82%</b>	<b>58.335.000</b>	<b>82,5%</b>	<b>58.335.000</b>	<b>83%</b>	<b>58.335.000</b>	<b>83%</b>	<b>291.675.000</b>		Padang Panjang	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan		2 dokumen (PDRB dan PPDA)	58.335.000	2 dokumen (PDRB dan PPDA)	58.335.000	2 dokumen (PDRB dan PPDA)	58.335.000	2 dokumen (PDRB dan PPDA)	58.335.000	2 dokumen (PDRB dan PPDA)	58.335.000	2 dokumen (PDRB dan PPDA)	291.675.000	Bid E Gov TI		
<b>TOTAL</b>								<b>13.158.518.025,00</b>		<b>24.951.710.401,00</b>		<b>14.344.582.921,00</b>		<b>9.373.539.817,00</b>		<b>18.986.145.058,00</b>		<b>59.852.186.223,00</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang meliputi urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik, ditetapkanlah beberapa indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Secara lengkap indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama yang mengacu**  
**pada tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Tujuan	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			(I) 2019	(II) 2020	(III) 2021	(IV) 2022	(V) 2023
1	2	3	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	1,86	2,65	2,7	2,85	3

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja sasaran/ Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun RPJMD 2023
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks SPBE	indeks	na	1,86	2,65	2,7	2,85	3	3
2.	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase	na	71 (Cukup informatif)	74 (Cukup informatif)	78 (Cukup informatif)	81 (menuju informatif)	84 (menuju informatif)	84
3.	Persentase data statistik sektoral yang terpublikai	persentase	na	25%	30%	32%	35%	40%	40%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023 serta suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang untuk 5 (lima) Tahun kedepan yaitu ” Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”.

Pelaksanaan Renstra ini nantinya, tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap eksistensi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya serta kesinergian organisasi perangkat daerah lainnya dalam gerakan bersama mewujudkan Padang Panjang sebagai Smart City.

Demikianlah Dokumen Renstra ini disusun, dan kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam dokumen ini, untuk itu kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum Dinas Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Mei 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KOTA PADANG PANJANG**



**MARWILIS, SH, M.Si**

NIP. 19610703 198203 1 008